



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016

Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran (TA) 2016 secara ringkas disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel III.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun 2016

	<i>Anggaran TA 2016 Setelah Perubahan</i>	<i>Realisasi TA 2016</i>	<i>Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran Rp)</i>
	<i>(Rp)</i>	<i>(Rp)</i>	
PENDAPATAN DAN BELANJA			
Pendapatan	1.723.957.430.560.00	1.575.601.833.680.00	(148.355.596.880,00)
Belanja	1.945.936.335.686.00	1.619.140.120.460.00	(326.796.215.226,00)
Surplus/(Defisit)	(221.978.905.126,00)	(43.538.286.780,00)	178.440.618.346,00
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	238.009.495.126.00	238.104.871.956.00	95.376.830,00
Pengeluaran Pembiayaan	16.030.590.000.00	16.030.590.000.00	-
Pembiayaan Netto	221.978.905.126,00	222.074.281.956,00	95.376.830,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	178.535.995.176,00	

Tabel III.1 menunjukkan Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Target Pendapatan telah ditetapkan sebesar Rp1.723.957.430.560.00, namun hanya dapat terealisasi sebesar Rp1.575.601.833.680,00 atau 91,39%;
2. Belanja TA 2016 hanya dapat terserap 83,21% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja TA 2016 terealisasi sebesar Rp1.619.140.120.460.00 sedangkan anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp1.945.936.335.686.00 berarti anggaran belanja yang tidak terserap mencapai Rp326.796.215.226,00;
3. Pada TA 2016 diperoleh defisit sebesar (Rp43.538.286.780,00) yang diperoleh dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.575.601.833.680,00 dikurangi Realisasi Belanja sebesar Rp1.619.140.120.460.00. Jika dibandingkan dengan Anggarannya maka defisit terealisasi lebih kecil sebesar Rp178.440.618.346,00.
4. Anggaran Pembiayaan Netto ditetapkan sebesar Rp221.978.905.126.00 dan dapat terealisasi sebesar Rp222.074.281.956.00, mengalami kenaikan sebesar Rp95.376.830,00 dari yang ditetapkan. Kenaikan tersebut berasal dari Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Pinjaman



Daerah sebesar Rp63.871.010,00 dan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp238.041.000.946,00.

5. Dengan Menggunakan Anggaran sebagai Indikator Kinerja Keuangan SiLPA pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp178.535.995.176,00 yang diperoleh dari defisit sebesar (Rp43.538.286.780,00) dan pembiayaan netto sebesar Rp222.074.281.956,00.

3.1.2 Realisasi TA 2016 Dibandingkan dengan TA 2015

Tabel III.2 Perbandingan Realisasi TA 2016 dengan TA 2015

	TA 2016		TA 2015
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN DAN BELANJA			
Pendapatan	1.723.957.430.560,00	1.575.601.833.680,00	1.432.159.651.029,00
Belanja & Transfer	1.945.936.335.686,00	1.619.140.120.460,00	1.494.447.291.801,80
Surplus/(Defisit)	(221.978.905.126,00)	(43.538.286.780,00)	(62.287.640.772,80)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	238.009.495.126,00	238.104.871.956,00	342.065.873.521,00
Pengeluaran Pembiayaan	16.030.590.000,00	16.030.590.000,00	41.760.737.622,00
Pembiayaan Netto	221.978.905.126,00	222.074.281.956,00	300.297.138.899,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	178.535.995.176,00	238.009.498.126,20

Tabel III.2 menunjukkan Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2016 dengan Tahun Anggaran 2015 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan TA 2016 adalah sebesar Rp1.575.601.833.680,00 mengalami peningkatan sebesar Rp143.442.182.651,00 atau 9,1% dibandingkan dengan TA 2015 yang terealisasi sebesar Rp1.432.159.651.029,00;
2. Belanja dan Transfer TA 2016 terealisasi sebesar Rp1.619.140.120.460,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2015 sebesar Rp1.494.447.291.801,80 mengalami kenaikan sebesar 7,7% Rp124.692.828.658,20;
3. Seperti yang terjadi pada Tahun Anggaran 2015 dan tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada TA 2016 juga mengalami Defisit Anggaran yaitu sebesar (Rp43.538.286.780,00) yang diperoleh atas Realisasi Pendapatan dikurangi Realisasi Belanja & Transfer. Dibandingkan dengan defisit TA 2015 sebesar (Rp62.287.640.772,80), defisit TA 2016 mengalami penurunan sebesar 43,1% atau sebesar Rp18.749.253.992,80;
4. Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2016 direalisasikan sebesar Rp222.074.281.956,00 cenderung mengalami penurunan sebesar (Rp78.222.856.943,00) dibandingkan dengan TA 2015 yang terealisasi sebesar Rp300.297.138.899,00.



5. Silpa yang didapat pada Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp178.535.995.176.00 lebih rendah 33,3% dibandingkan dengan TA 2015 sebesar Rp238.009.498.126,20.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

1. Hambatan Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan, baik DAK, Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak maupun DAU, bagian terbesar dari dana perimbangan tersebut berasal dari DAU, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih sangat bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu meskipun upaya-upaya optimalisasi pendapatan telah dilakukan namun kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih relatif kecil. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah sehingga perlu pemecahan yang tepat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan sudah terlihat dari semakin meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun, namun demikian masih perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD tanpa harus menaikkan tarif pajak dan retribusi yang dapat memberatkan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta solusi yang dapat ditempuh adalah :

- a. Menumbuhkan kesadaran bagi para wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak/retribusi tepat waktu serta penegakan peraturan perundangan perpajakan dan retribusi daerah, agar masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui :
 - 1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Penagihan pajak secara persuasif;
 - 3) Pemeriksaan dan pemantauan terhadap pembukuan wajib pajak;
 - 4) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi/pihak yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak yang belum sesuai dengan potensi dan menjadi hak pemerintah daerah, upaya



yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi.

- c. Guna terus meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dibidang pajak dan retribusi daerah telah ditempuh langkah-langkah antara lain :
- 1) Melakukan penggalan potensi-potensi pendapatan daerah, mengintensifkan siklus pendataan sampai dengan penarikan, pendataan ulang WP dan WR;
 - 2) Melakukan pengawasan yang baik kepada petugas penarik/pemungut serta memberikan sanksi kepada WP dan WR yang tidak memenuhi kewajibannya.

2. Hambatan Pencapaian Target Belanja.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini berarti bahwa APBD disusun tidak saja berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Secara umum permasalahan belanja daerah adalah adanya ketidakseimbangan kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan pendapatan daerah yang direncanakan. Kemudian disisi lain tingkat penyerapan belanja dari tahun ketahun tetap sekitar 80% sehingga berakibat sisa anggaran yang besar, hal ini disebabkan berbagai masalah antara lain jumlah paket pekerjaan yang banyak tetapi tidak sebanding dengan jumlah SDM yang menangani paket pekerjaan tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan tidak cukup disebabkan banyak kegiatan dalam proses lelang gagal, ataupun ketentuan peraturan yang turun terlambat pada beberapa jenis kegiatan yang dananya dibiayai dari pusat.

3. Hambatan Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan daerah adalah terbatasnya sumber-sumber pembiayaan daerah untuk dapat menutup defisit anggaran daerah, sementara apabila pada sisi pembiayaan pengeluaran daerah terdapat kewajiban pemerintah daerah untuk pelunasan pinjaman daerah.



4. Hambatan Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan barang daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi sangat penting barang daerah atau aset tetap dapat dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi beberapa hal menjadi hambatan antara lain karena jumlah fisik aset tetap yang banyak sehingga membutuhkan ketelitian dan ketekunan, kapasitas SDM pada SKPD kurang memadai terkait dengan kemampuan dan kemauan serta permasalahan teknis lainnya yang membutuhkan komitmen kita bersama agar pengelolaan barang menjadi semakin baik.